

**INDEPENDENSI BANK INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2004 TENTANG BANK
INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

oleh :

REZA KERISNADI

02033160288

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2008**

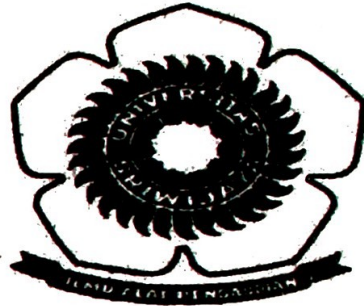
82 07

c.1/1

S
346.08207
ker
v
e-990222
2008

a.4874/4877 pg.

**INDEPENDENSI BANK INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2004 TENTANG BANK
INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

oleh :

REZA KERISNADI

02033100288

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2008**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Reza Kerisnadi
Nomor Induk Mahasiswa : 02033100288
Program Studi : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : Independensi Bank Indonesia Berdasarkan
Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank
Indonesia

Indralaya, Agustus 2008

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu



Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP 131789519



H.Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum
NIP 131639379

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 9 Agustus 2008

Nama : Reza Kerisnadi
Nomor Induk Mahasiswa : 02033100288
Fakultas : Hukum
Program kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI :

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H
2. Sekretaris : H. Hambali Hasan, S.H.
3. Anggota : Arfianna Novera, S.H., M.Hum.

(Handwritten signatures of the examiners)



Indralaya, 9 Agustus 2008

Mengetahui,

Dekan,

(Handwritten signature of H.M. Rasyid Ariman)

H.M. Rasyid Ariman, SH.,M.H

NIP. 130 609 256

MOTTO :

Semua ini sudah kulalui, dan harus kulupakan sudah saatnya kebahagiaan yang tertunda kini ada di hidupku, merindukan kebahagiaan yang pernah ada dalam hari-hari ku

(Penulis)

Kupersembahkan kepada :

- Allah S.W.T*
- Prophet Muhammad S.A.W*
- Kedua orang tuaku*
- Bianca M*

KATA PENGANTAR

Bismillaahir Rahmaanir Rahim. Segala puji bagi Allah S.W.T atas segala karunia dan limpahan rahmatnya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad S.A.W, para ahlul bait, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia kepada ajarannya hingga akhir zaman.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan negara Asia lainnya, sangat memukul kehidupan rakyat Indonesia yang sangat menderita terkena dampak fenomena ekonomi global. Dari pengalaman krisis tahun 1997 Pemerintah Indonesia membuat Undang-undang Tentang Bank Indonesia yang isinya menegaskan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang Independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan pihak lain.

Menurut pengamatan saya keberadaan dan peranan Bank Indonesia sangat menarik. Bank Indonesia mempunyai keunikan dan karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan Bank Sentral di negara lain. Peranan Bank Indonesia menunjukkan pasang surut sebuah lembaga otoritas moneter di Indonesia. Bank Indonesia pernah secara langsung terjun menangani kegiatan komersial, hal ini merupakan catatan tersendiri bagi Bank Indonesia. Bank Indonesia pernah berada di dalam Pemerintahan, dimana pada saat itu Bank Indonesia seharusnya sebagai *the*

guardian of monetary stability, ternyata hanya menjadi penyelenggara kebijakan moneter Pemerintah tanpa otoritas yang memadai.

Inilah dimana saat manusia saling membutuhkan, tanpa dukungan dan motivasi dari orang-orang yang menghendaki selesainya skripsi saya ini. Sehingga mendorong penulis untuk mempersembahkan yang terbaik. Saya sangat beruntung mempunyai pembimbing seperti Ibu Arviana Novera, S.H., M.Hum dan Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum yang tanpa lelah mau membimbing saya selama ini. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Eddy Sulaeman Yusuf sebagai Direktorat Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Pusat yang memberikan kemudahan saya untuk mendapat izin riset di Bank Indonesia Palembang, juga kepada Bapak Tony, Rizal, Ibu Kun, Pica, yang telah membantu riset saya selama di Bank Indonesia Palembang.

Palembang, Agustus 2008

Reza Kerisnadi

DAFTAR ISI

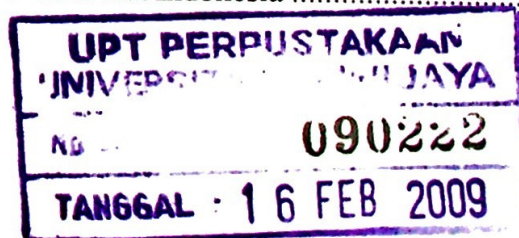
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DANPERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	9
D. Ruang Lingkup	10
E. Metode Penulisan	10

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN DAN BANK INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	
1. Pengertian Bank	13
2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan	18
3. Jenis-jenis Bank.....	19
4. Tingkat Kesehatan Bank	22
B. Tinjauan Umum Tentang Bank Indonesia	
1. Sejarah Bank Indonesia	27
2. Tujuan dan Tugas Pokok Bank Indonesia	32



3. Alasan Bank Harus Diatur dan Diawasi.....	37
--	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Apakah kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan.....	39
B. Bagaimanakah Independensi Bank Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2004.....	52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada pertengahan tahun 1997 perekonomian Indonesia mengalami situasi yang sulit sebagai akibat dari krisis mata uang rupiah yang dengan cepat meluas ke krisis keuangan dan perekonomian yang merobohkan perekonomian Indonesia dengan cepat. Jatuhnya nilai rupiah di mulai setelah jatuhnya mata uang di korea selatan dan Thailand dan menjalar ke seluruh kawasan asia tenggara. Penularan krisis yang mulai dari krisis nilai tukar telah meluas menjadi krisis perbankan, krisis utang luar negeri, dan krisis ekonomi.¹

Pemerintah pada saat itu melakukan serangkaian kebijakan moneter dan fiskal, seperti pelebaran kisaran kurs mata uang, peningkatan suku bunga dan pengetatan fiskal, hal ini ditempuh sebagai konsekuensi logis dari pilihan kebijakan yang harus segera ditempuh oleh pemerintah (*policy response*).² Krisis mata uang yang berlanjut menjadi krisis likuiditas yang besar karena kelemahan struktural di sektor perbankan dan tingginya suku bunga hutang luar negeri serta lemahnya tingkat modal perbankan nasional turut memperburuk kondisi ekonomi bangsa Indonesia.

¹ Permadi Grandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal xv

² Badan Penyehatan Perbankan Nasional, *Rencana Strategis 1999 - 2004*, BPPN, Jakarta, 2000, hal 5

Pengetatan likuiditas yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi terdepresiasi nilai rupiah memberikan dampak buruk bagi sektor perbankan dan sektor riil. Terlebih lagi ketika pemerintah mengumumkan penutupan 16 bank pada tanggal 1 November 1997, pada dasarnya tindakan ini diambil oleh pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, tetapi yang terjadi malah keadaan yang sebaliknya.

Selain daripada itu, kemudian pemerintah tidak lagi menggunakan istilah likuidasi bank, tetapi mengantikannya dengan istilah Bank Beku Operasi (BBO) yang pada hakikatnya hampir sama dengan pembekuan atau pengambilalihan bank yang kemudian tentunya diikuti oleh likuidasi bank tersebut (jika tidak dapat disehatkan).³

Kepercayaan masyarakat pada perbankan nasional runtuh, kekhawatiran akan terjadinya pencabutan izin usaha berikutnya dan tidak adanya program penjaminan simpanan telah memicu kepanikan masyarakat atas keamanan dananya di bank. Hal demikian mendorong masyarakat untuk menarik dananya di perbankan nasional secara besar-besaran dan berusaha memindahkan simpanan dari satu bank ke bank lain yang dianggap lebih sehat. Sebagai gambaran, uang kartal yang dipegang oleh masyarakat melonjak tajam dari Rp 24,9 triliun pada akhir Oktober 1997 menjadi Rp

³ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 31

37,5 triliun pada akhir Januari 1998, dan jumlah ini terus semakin meningkat hingga mencapai puncaknya pada bulan Juli 1998 yang mencapai Rp 45,5 triliun.⁴

Dalam situasi tersebut, perbankan Indonesia menghadapi tekanan dari 5 (lima) jurusan yang mengakibatkan bank mengalami kesulitan likuiditas yang berat dan sistemik, yaitu antara lain:⁵

1. Tekanan dari kreditur luar negeri yang menuntut pembayaran kewajiban valasnya dan diikuti dengan pembekuan atau penarikan berbagai fasilitas transaksi valasnya
2. Tekanan dari masyarakat penyimpan (deposan dan kreditur) yang melakukan penarikan dana secara serentak dan massal (*Rush*)
3. Tekanan dari pasar uang antar bank, karena kelangkaan dana, dan bank sangat selektif dengan tingkat bunga yang tinggi
4. Tekanan dari debitur dunia usaha, yang juga menghadapi tekanan likuiditas dan tidak mampu membayar kredit sebagaimana mestinya
5. Tekanan dari otoritas pengawasan bank yang mengetarkan ketentuan dan melakukan pembatasan atas kegiatan bank.

Menghadapi situasi krisis perbankan pada pertengahan tahun 1997 yang demikian berat dan luar biasa, bank sentral, pengawasan bank, dan pemerintah

⁴ www.bi.go.id, *Bantuan Likuiditas Bank Indonesia: Kebijakan Pemerintah Untuk Menyelamatkan Perekonomian Nasional*, Jakarta, September 2000, hal 2

⁵ Permadi Gandapraja, *Op. cit*, hal xvi

diliputi kepanikan. Langkah maksimal diambil demi penyelamatan melawan krisis, melalui antara lain :⁶

1. Kebijakan nilai tukar untuk melawan krisis nilai tukar dan mengamankan cadangan devisa Negara
2. Kebijakan moneter antara lain kebijakan uang ketat guna mencegah spekulasi dan mengamankan parameter moneter
3. Kebijakan sistem pembayaran dan kebijakan perbankan untuk mengamankan kemandegan sistem pembayaran dan keruntuhan sistem perbankan secara total
4. Meminta bantuan tenaga ahli dan dukungan dana amunisi dari IMF
5. Berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap bank melalui likuidasi bank, beku operasi, beku kegiatan usaha, bank take over, Program Penjaminan Pemerintah, pembentukan BPPN, restrukturisasi (asset bermasalah), dan rekapitalisasi (permodalan) perbankan.

Disamping itu dalam rangka upaya pembenahan sistem perbankan yang merupakan hal terpenting dari tugas pemerintah dalam memulihkan kepercayaan masyarakat dan kreditur terhadap perbankan maka pada tanggal 26 Januari 1998 pemerintah menerbitkan KEPPRES No. 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. KEPPRES ini ditindak lanjuti dengan diterbitkannya KEPPRES No. 27 tahun 1998 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai langkah strategis mengembalikan kepercayaan masyarakat

⁶ Ibid

dan kreditur terhadap perbankan. Keberadaan BPPN dinyatakan bubar sejak diterbitkannya KEPPRES No. 15 tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan pembubaran BPPN terhitung sejak 27 februari 2004.⁷

Berdasarkan fungsi-fungsi pokok bank yaitu menghimpun dana masyarakat, mengelola, serta memberikan layanan jasa lalu lintas pembayaran dan layanan jasa perbankan tersebut, maka perlu diperhatikan dan diwaspadai hal-hal berikut ini :⁸

1. Fungsi yang paling kritis adalah penanaman dalam bentuk pemberian kredit dan berbagai jenis aset produktif lainnya. Oleh karenanya, fungsi ini mengandung resiko dan disebut sebagai aset beresiko (*risk assets*). Apabila bank tidak mampu mengendalikan resiko, timbul kredit bermasalah dalam jumlah yang besar, atau bahkan kredit macet, sehingga bank sulit mempertahankan kelangsungan usahanya, merugikan deposan dan kreditur dan bahkan berdampak lebih luas.
2. Dalam melakukan fungsinya, bank dapat menerbitkan instrument keuangan yang bersifat substitutif atas uang, seperti cheque atau instrument lainnya yang serupa yang berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar. Apabila tidak ada pengaturan dan pengawasan maka dapat terjadi distorsi, sehingga mengganggu pengendalian moneter yang tujuannya mengendalikan nilai mata

⁷ Sulistiono Kartawacana, (ekonomi- nasional) *Artikel : Menggugat Skenario Pembubaran BPPN*, 13 Januari 2005

⁸ Permadi Gandapraja, Op. cit, hal 5

uang, inflasi, harga, dan harga tukar yang dampaknya dalam perekonomian sangat luas dan tali-temali.

3. Bank yang diizinkan melakukan transaksi valuta asing (bank devisa) dapat melakukan transaksi dengan mitranya di luar negeri, walaupun lokasi kantornya disuatu kota dalam suatu negara. Apabila lokasi kantornya telah menyebar, baik di dalam maupun di luar negeri, jangkauan transaksi keuangannya jelas lebih luas, sehingga resikonya menjadi lebih besar.
4. Manajemen likuiditas merupakan suatu prasyarat penting dalam menjamin bank agar senantiasa dapat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran. Untuk itu perlu pemahaman dan pengelolaan sisi tagihan (*assets*) dan kewajiban (*liabilities*), baik dari segi besaran, kondisi, jangka waktu (*tenor*), maupun jatuh temponya (*maturity*), sehingga dapat ditentukan jumlah likuiditas yang diperlukan dan bentuk-bentuk alat likuid yang harus dipelihara. Apabila manajemen likuiditas tidak dilakukan sebagaimana mestinya, bank bisa tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar secara lancar dan tepat waktu sehingga dapat menimbulkan masalah bagi banyak pihak (deposan dan kreditur), termasuk kemungkinan terjadinya penarikan dana secara massal atau penularan terhadap bank lain.
5. Manajemen modal juga merupakan prasyarat penting yang bisa menjadi “benteng pertahanan” bank menghadapi berbagai resiko yang mungkin

timbul. Resiko kerugian harus menjadi fokus manajemen modal dalam menetapkan kecukupan modal yang diperlukan dan disediakan. Apabila bank tidak mampu melakukan hal tersebut maka modal tidak akan bertambah bahkan berkurang karena timbul kerugian dan/atau penyisihan cadangan resiko dari aset yang beresiko yang dapat menyebabkan bank insolven, artinya jumlah kewajiban lebih besar daripada jumlah harta dan tagihan.

Bank Indonesia sebagai bank sentral berdasarkan Undang-undang No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia adalah lembaga Negara yang independen. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah ditopang dengan tiga pilar utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang cepat dan tepat serta mengatur dan mengawasi sistem perbankan.⁹

Tugas Bank Sentral memang sangat berat sebagaimana dikatakan oleh Gregory N. Mankiw :¹⁰

Monetary policy is not easy. Central Bankers have multiple objectives and over time, must control a variety of economic circumstances. Their job is made all more difficult by wide spread disagreement among economist. Some economist view monetary policy as a potential cure for economic fluctuations. Others could be satisfied if monetary policy could avoid being a cause of fluctuations.

⁹ Lihat Pasal 7 UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia

¹⁰ Gregory N. Mankiw, *Monetary Policy*. The University of Chicago press, Chicago, 1997, hal 23

Hampir senada dengan pendapat diatas, Soedrajat Djiwandono, mantan Gubernur Bank Indonesia berpendapat dalam jurnal ekonomi pembangunan pangsa sebagaimana dikutip oleh Iswardono :¹¹

Bahwa independensi Bank Indonesia-berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab penyelenggaraan kebijakan moneter, bagaimana mengendalikan inflasi melalui berbagai kebijakan pengendalian besaran moneter, tingkat suku bunga, kurs dan sebagainya dengan berbagai instrument yang berbeda.

Kemandirian dan independensi Bank Indonesia bukan berarti tanpa batas. Dalam hal ini Muhammad Djumhana berpendapat bahwa, kemandirian Bank Indonesia menyebabkan pihak lain dilarang untuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia, dan Bank Indonesia berhak menolak segala bentuk campur tangan dari pihak manapun. Namun dalam kemandiriannya Bank Indonesia tetap harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada DPR RI sebagai bentuk akuntabilitas publik, sedangkan laporannya dapat diperiksa oleh BPK.¹²

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini :

¹¹ Iswardono, Mei 2000, *BLBI : Konsekwensi Logis "The last Resort" Bank Indonesia*, Pangsa : Jurnal Ekonomi Pembangunan, diterbitkan oleh Devisi Pangsa Himpunan Mahasiswa Studi Pembangunan FE-UGM.

¹² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 95

1. Apakah kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan
2. Bagaimanakah Independensi Bank Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2004

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan penulisan

- A. Untuk mengetahui kewenangan Bank Indonesia dalam mengawasi bank.
- B. Untuk mengetahui Independensi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

2. Manfaat penulisan

- A. Manfaat teoritis yaitu penulisan ini diharapkan secara teoritis dapat menambah wawasan dan mengembangkan Ilmu Hukum Perbankan khususnya kajian tentang Bank Indonesia.
- B. Manfaat praktis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dan penegak hukum dibidang perbankan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian skripsi ini difokuskan pada pengawasan Bank Indonesia serta Independensi Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dan selanjutnya dituangkan ke dalam ketentuan pelaksanaan yaitu dalam Peraturan Bank Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum skunder yang mencakup bahan hukum primer, skunder dan tersier.

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menelaah data sekunder berupa bahan kepustakaan dengan didukung data primer guna memperoleh hasil penelitian yang benar dan objektif.

3. Jenis dan sumber data

A. Jenis Data

Penelitian normatif ini menggunakan data skunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

B. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari data skunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kepustakaan. Yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang berupa peraturan perundang-undangan.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, meliputi hasil karya tulis dari kalangan hukum bisnis khususnya perbankan, hasil survei, maupun literatur-literatur mengenai perbankan, Bank Indonesia, dan lain-lain.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi majalah, surat kabar, tulisan ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik pengumpulan data dan analisis data

Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, buku-buku ilmiah, ataupun sumber-sumber lain seperti media cetak dan media elektronik yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Data yang diperoleh dan dianalisis secara diskriptif kualitatif dalam penelitian ini data-data yang didapat dari bahan-bahan hukum dianalisis dari perspektif konsep-konsep kebijakan perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Permadi Grandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Badan Penyehatan Perbankan Nasional, *Rencana Strategis 1999 - 2004*, BPPN, Jakarta, 2000
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Gregory N. Mankiw, *Monetary Policy*, The University of Chicago press, Chicago, 1997
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Thomas Suyatno, Et-al, *Kelembagaan Perbankan*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- OP.Simorangkir, *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1989
- Prathama Raharja, *Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia*, Seri Kebanksentralan No. 7, PPSK Bank Indonesia, Jakarta, Desember 2003
- Booklet Perbankan Indonesia 2008*, Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan
- J. Soedrajad Djiwandono, Et-al, *Sejarah Bank Indonesia Periode I : 1945-1959, Bank Indonesia Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta, 2005

J. Soedradjad Djiwandono, Et-al, *Sejarah Bank Indonesia Periode II : 1959-1966, Bank Indonesia Pada Masa Ekonomi Terpimpin*, Bank Indonesia, Jakarta, 2005

M. Dawam Rahardjo, *Independensi Bank Indonesia Dalam Kemelut Politik*, PT. Cidesindo, Jakarta, 2001

Perry Warjiyo, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Jakarta, 2004

Undang-undang

UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia

UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia No. 7/38/PBI/2005

Makalah

Sulistiono Kartawacana, (ekonomi- nasional) Artikel : Menggugat Skenario Pembubaran BPPN, 13 Januari 2005

Iswardono, Mei 2000, *BLBI : Konsekwensi Logis "The last Resort" Bank Indonesia*, Pangsa : Jurnal Ekonomi Pembangunan, diterbitkan oleh Devisi Pangsa Himpunan Mahasiswa Studi Pembangunan FE-UGM

Internet

<http://bi.go.id>, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia: Kebijakan Pemerintah Untuk Menyelamatkan Perekonomian Nasional, Jakarta, September 2000

<http://bi.go.id>, Bank Dalam Pengawasan Khusus, Diakses tanggal 21 april 2008

<http://bi.go.id>, Bank Dalam Pengawasan Khusus, Diakses tanggal 28 april 2008

<http://bi.go.id>, Prosedur Bank Dalam Pengawasan Intensif dan Dalam Pengawasan Khusus, Diakses Tanggal 7 April 2008, hal 3

<http://bi.go.id>, Bank Dalam Pengawasan Khusus, Diakses tanggal 11 Mei 2008

<http://bi.go.id>, Bank Dalam Pengawasan Khusus, Diakses tanggal 16 Mei 2008

<http://bi.go.id>, Bank Dalam Pengawasan Khusus, Diakses tanggal 22 Mei 2008

·
·
·
·
·

·

·

·

·